

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Nur, E., dan Julita. 2015. Analisis Pengaruh Unsur-Unsur *Internal Control System* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1-14.
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Anonim .2014. LAKIP Kulon Progo Raih B. <https://www.kulonprogokab.go.id>. Diakses tanggal 25 September 2017 pukul 21.30 WIB.
- Apriyani, F. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cahyani, N. M. M., dan Utama, I. M. K. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 825-840.
- Darma, E.S. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Davis, J.H., Schoorman, F.D., dan Donaldson, L. 1997. *Toward a Stewardship Theory of Management*. *Academy of Management review*, 22(1), 20-47.
- Ellwood, S. 1993. *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management*. *Local Government Studies*, 19(3), 368-386.
- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Kaihatu, T.S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 8(1), 1-9.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- MenPANRB, Humas. 2017. Pacu Motivasi, Tambah DAK untuk Pemda Berakuntabilitas Tinggi. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 28 September 2017 pukul 14.30 WIB.
- MenPANRB, Humas. 2017. Penyerahan LHE AKIP 2016 Wilayah Regional II. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 22 Mei 2017 pukul 20.20 WIB.
- MenPANRB, Humas. 2017. Penyerahan LHE AKIP 2016 Wilayah Regional III, MenPANRB: Kinerja Birokrat Harus Memberi Manfaat Untuk Rakyat. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 22 Mei 2017 pukul 20.30 WIB.
- MenPANRB, Humas. 2017. Serahkan Evaluasi AKIP Wilayah I, KemenPANRB Minta Pemda Lebih Serius Benahi Tatakelola Pemerintah. <https://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 22 Mei 2017 pukul 20.10 WIB.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A. T. 2017. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nazaruddin, I., Suryandari, E., dan Gunawan, B. 2016. Desentralisasi, Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 4(2), 77-97.
- Notoatmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Onuorah, A. C., & Appah, E. 2012. *Accountability and Public Sector Financial Management in Nigeria*. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(6), 1-17.
- Pratolo, S. 2005. *Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis* sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(2), 105-114.
- Pratolo, S., dan Jatmiko, B. 2017. *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M.
- Pratolo, S., Jatmiko, B., dan Anwar, M. 2016. *Financial Statement Public Sectors Berbasis Web-ICT: Pola Pemetaan Laporan Keuangan Melalui Web-ICT untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bantul)*. *Research Center Repository UMY*.

- Putri, E.M.N., Tanjung, A.R., dan Susilatri. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1).
- Riantiarno, R., dan Azlina, N. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 3(3).
- Rofika dan Ardianto. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi ISSN 2337-4314* 2 (2), 197-209.
- Sekretariat Negara. 1999. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sekretariat Negara. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sekretariat Negara. 1999. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Setiawan, E., Andreas, dan Rusli 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(1).
- Setyawan, H., Rusli, A., dan Hariyani, E. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 251-164.
- Sofyani, H., dan Akbar, R. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184-205.

- Sofyani, H., dan Akbar, R. 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 153-173.
- Ulum, Miftahul. 2017. Menpan Sebut Bali Bisa Jadi Contoh Akuntabilitas. <http://bali.bisnis.com>. Diakses tanggal 15 Juli 2017 pukul 20.35 WIB.
- Wahid, I., Nasir, A., dan Supriono. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 2457-2471.
- Wardhana, G. A. S., Rasmini, N. K., dan Astika, I. B. P. (2015). Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(9), 571-596.
- Wicaksana, B.A. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1), 15-27.